

## KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM KEANGGOTAAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB)

Yusra Mufassir<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Asian Century refers to the dominant role that Asia is expected to play in the 21st century due to its progress economy and demographic trends. The concept of the Asian Century gained credence following the rapid economic growth of China and India since the 1980s. Developing Asia will need to invest \$1.7 trillion per year in infrastructure until 2030 to maintain its growth momentum. The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is a multilateral development bank with a mission to improve social and economic outcomes in Asia. Australia is a country that is resistant to the initial formation of AIIB, but on December 2015 Australia decided to join the AIIB membership and become one of the prospective founding members of AIIB. The joining of Australia in AIIB is a dynamic in the political economy of the international economy that developed in the 21st century. The existence of the Asian Century as a magnet of the world economy becomes that global countries change the direction of policies that lead to Asia centric. This research is explained descriptively accompanied by quantitative data by analyzing through the perspective of a modern world system which indicates that the existence of AIIB indirectly creates dependency, class change, shifting hegemony to Asian centric towards third world countries and the center.*

**Keywords:** *Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, Asian Century, national interest of Australia*

### Pendahuluan

Di kawasan Asia, pertumbuhan infrastruktur untuk perkembangan perekonomian sangatlah penting. Dalam rentang waktu 2016-2030 kawasan Asia diperkirakan membutuhkan modal investasi melebihi US\$ 26 triliun atau US\$ 1,7 triliun per tahun sebagai pembagian US\$ 14,7 triliun akan digunakan untuk pengadaan proyek pembangkit listrik dan US\$ 8,4 triliun untuk transportasi. Investasi dalam telekomunikasi akan mencapai US\$ 2,3 triliun, serta kebutuhan air bersih dan penanganan sanitasi sebesar US\$ 800 miliar selama periode tersebut. ([adb.org](http://adb.org), 2020).

Namun kapabilitas negara-negara di Asia serta sektor swasta untuk membiayai infrastruktur kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan di kawasan Asia hingga tahun 2030. Dari total kebutuhan investasi 24 negara kawasan Asia sebesar US\$ 26 triliun, hanya mampu terpenuhi US\$ 881 miliar pertahunnya. Dalam kebutuhan investasi infrastruktur di kawasan Asia ini, Presiden China Xi Jinping bersama Perdana Menteri Li Keqiang mulai menginisiasi pembentukan suatu Bank yang dirancang untuk

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: yusramufassir@gmail.com

memberikan bantuan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas regional di Asia pada pertemuan APEC Leaders bulan Oktober 2013 di Bali ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 2020).

Pada bulan Oktober 2014 satu tahun setelah pengenalan inisiasi AIIB perwakilan dari 22 negara Asia menghadiri upacara penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai peluncuran awal AIIB yang dilaksanakan di Beijing. Namun dalam masa pembentukannya, AIIB mendapat resistensi dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan Jepang yang menganggap AIIB sebagai perluasan hegemoni ekonomi China di kawasan Asia. Australia sebagai salah satu negara yang resisten terhadap pembentukan AIIB memilih tidak ikut berpartisipasi dalam pertemuan penandatanganan MoU AIIB yang dihadiri negara-negara Asia. Adapun beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan Australia diantaranya ([reuters.com](http://reuters.com), 2020).

1. AIIB dipandang sebagai perluasan hegemoni ekonomi China di Asia. Asas kepemilikan saham 49,2% yang dimiliki China dapat menciptakan suatu kekuasaan yang mengatur tanpa adanya *balance and control* dalam setiap prospek yang ingin dicapai.
2. Prospek AIIB yang sejalan dengan *cita-cita One Belt One road* (OBOR) China sehingga akan mempengaruhi aktifitas AIIB dalam meningkatkan pertumbuhan infrastruktur ekonomi di kawasan Asia hingga Eurasia.
3. Desakan Amerika kepada negara-negara sekutu tradisionalnya termasuk Australia untuk tidak bergabung dalam AIIB.
4. Australia sudah ikut dalam institusi keuangan internasional serupa, yaitu ADB dan *World Bank* sejak 1966.

Australia yang awalnya resisten terhadap pembentukan AIIB kemudian merubah sikap dan memilih untuk bergabung pada keanggotaan pendiri AIIB pada tanggal 29 Juni 2015 yang menjadikan Australia termasuk sebagai *Prospective Founding Members* (PFM) dalam merumuskan AoA yang dibentuk bersama-sama negara PFM lainnya. Hal yang mendasari perubahan sikap resistensi Australia terhadap AIIB merupakan implikasi dalam melihat prospek kegiatan AIIB pasca bergabungnya Inggris dalam keanggotaan AIIB pada 12 Maret 2015. Mayoritas spektrum pandangan kabinet Australia mendukung pemerintahan melakukan upaya untuk ikut dalam keanggotaan di AIIB ([dpr.go.id](http://dpr.go.id), 2020). Australia kemudian bergabung dalam negoisasi bersama negara-negara anggota AIIB pada bulan Maret-Juli 2015 untuk membahas struktur bank, komposisi direksi, tata kelola, dan transparansi.

Australia kemudian bergabung dalam keanggotaan AIIB dengan menandatangani *Article of Agreement* (AoA) AIIB dalam upacara penandatanganan perjanjian AoA AIIB di Beijing, China dengan dihadiri oleh Menteri Bendahara Negara (*Treasurer*) Australia Joe Hockey. Australia memberikan kontribusi senilai US \$ 738 miliar sebagai modal awal yang diserahkan ke AIIB selama lima tahun sejak 30 hari sebelum penandatanganan artikel dan menjadi pemegang saham terbesar keenam di AIIB sekaligus sebagai salah satu pendiri AIIB bersama 60 anggota lainnya.

Dari latar belakang tersebut, Australia merupakan salah satu negara yang dapat mengupayakan dan mempertahankan kepentingannya dalam mempengaruhi keputusan di dalam kelembagaan internasional di kawasan Asia seperti AIIB. Hal ini mendasari apa saja yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan sikap politik

internasional Australia yang pada awalnya resisten terhadap pembentukan AIIB dan kemudian merubah sikap dengan ikut serta didalam kenggotaan AIIB.

## **Kerangka Teori dan Konsep**

### ***Teori Modern World System***

Interaksi yang terjalin antara negara-negara maupun aktor hubungan internasional di dunia yang ada dapat dilihat dalam prespektif *world system theory*, yaitu negara dibagi ke dalam tiga golongan hirarki, yaitu *core*, *semi-periphery*, dan *periphery*. Melalui pendekatan *world system theory* yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Cara pandang teori ini befokus pada melihat dunia sebagai area yang memiliki struktur keterkaitan negara-negara *core*, *semi-periphery* dan *periphery*. Maka teori ini memandang bahwa dalam ranah Ekonomi Politik Internasional ada struktur yang berhirarki dan terefleksi dari *struggle of states* dan kelas-kelas ekonomi (Wallerstein, 1974).

Merujuk pada *Modern World System Theory*, AIIB jika diamati sebenarnya menggambarkan adanya aktivitas negara-negara *core* dan *periphery* yang tergambarkan dengan adanya hirarki atau struktur yakni negara-negara *core* yang menjaga agar sistem konfliktual dan bersifat eksploitatif terus berjalan. Negara-negara yang tergolong sebagai *core* memiliki karakteristik sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang besar, spesialisasi pada manufaktur, dan memiliki modal yang biasanya akan disalurkan ke negara-negara *periphery* baik dalam bentuk dana bantuan maupun investasi untuk keperluan pembangunan di negara-negara berkembang.

Dalam AIIB, setidaknya ada beberapa negara yang dapat digolongkan sebagai negara-negara *core* salah satunya ialah Australia yang bergabung dalam AIIB. Selama ini negara-negara *core* ini telah menjadi bagian dari sistem kapitalis global melalui transfer sumber daya alam dari negara-negara *periphery*. Sebagai negara industri, kebutuhan negara-negara *core* terhadap sumber daya alam adalah sebuah hal yang penting.

Australia yang merupakan negara *core* dalam lembaga ini juga memiliki kepentingan tersendiri. AIIB akan menjadi salah satu wadah untuk menjaga eksistensinya di kawasan asia pasifik dan sekaligus menjaga pengaruh dari China yang dikenal sebagai *free rider* di kawasan Asia. Serta Australia dapat memiliki kekuatan diplomasi dengan menjadi negara mediator antara negara yang tergabung dalam AIIB dan negara yang tidak tergabung dalam AIIB.

### ***Konsep Kepentingan Nasional***

Kepentingan nasional merupakan unsur utama kepentingan suatu negara. Mengutip perkataan Morgenthau bahwa Setiap negara mempunyai hak yang sama, membutuhkan sesuatu yang dianggap mutlak terhadap keberlangsungan hidup warga negaranya dan integritas wilayah nasionalnya, maka ketika negara ingin mencapai kepentingannya tanpa mengganggu negara lain, sebuah negara harus menggunakan strategi kesepakatan melalui kerjasama internasional dengan negara lain (Morgenthau, 1948).

Beberapa kepentingan yang ingin dijaga serta dicapai oleh Australia meliputi kepentingan bertahan hidup, kepentingan Ekonominya, serta kepentingan pengaruh terhadap aktor-aktor internasional dalam jangka waktu yang lama. Negara memiliki kepentingan menjaga pengaruhnya dalam interaksi internasional antar negara, karna hal ini akan sejalan dengan orientasi yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Dalam hal ini

setidaknya Australia berupaya tetap menjaga eksistensi pengaruhnya khususnya terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang menjadi negara satelit Australia dalam setiap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diikuti oleh Australia dan negara-negara Asia Pasifik. Dari klasifikasi tersebut, maka dapat diartikan bahwa adanya kerjasama yang dilakukan oleh negara untuk membantu pencapaian tujuan kepentingan nasional dalam kesejahteraan masyarakatnya.

Kepentingan nasional merupakan dasar suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain dan merupakan tujuan yang ingin dicapai berhubungan dengan kebutuhan negara. Dengan demikian konsep kepentingan nasional menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara dan menjadi awal pembentukan kebijakan luar negeri.

Setiap negara mempunyai kebutuhan maupun keunggulannya masing-masing, maka untuk memenuhi kebutuhan maupun memasarkan keunggulannya, negara-negara menjalin interaksi yaitu dalam bentuk kerjasama. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Sehingga pada saat negara ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan (Kindleberger, 1986). Selain itu negara sebagai aktor utama dalam percaturan internasional harus memiliki nilai jual dalam arti ada kemampuan yang dimilikinya, sehingga ia disegani oleh lawannya yang menjadi bahan pertimbangan kerjasama (Goldstein & Pevehouse 2010). Dalam penelitian ini, penulis melihat kepentingan yang ingin dicapai Cina dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kepentingan ekonomi dan politik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan mengenai kepentingan China dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik media cetak maupun media elektronik.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Kepentingan Australia Dalam Keanggotaan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)***

Adanya kebangkitan Asia atau yang disebut sebagai *The Pacific Century* atau *Asia-Pacific Century* adalah istilah yang telah digunakan untuk menggambarkan pergeseran perekonomian abad ke-21 yang akan didominasi secara ekonomi oleh negara-negara di wilayah Asia-Pasifik, khususnya China, Jepang, India, Korea Selatan, Taiwan, para anggota ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Pergeseran ekonomi yang akan berlangsung di kawasan Asia Pasifik ini menjadikan aktor-aktor ekonomi maupun negara-negara akan berfokus terhadap kawasan Asia yang mayoritas adalah negara *periphery*.

Krisis global pada tahun 2008-2009 yang melanda dua perekonomian dunia yaitu Amerika Serikat serta Uni Eropa akibat krisis dari menggelembungnya kredit properti di Amerika Serikat yang berdampak global. Kawasan Asia yang terkena dampak ekonomi mampu bertahan dari krisis. Pada krisis ini, Asia menjadi penggerak

penting dalam aktivitas ekonomi global sehingga menjadikan kawasan Asia menjadi pusat dari perputaran ekonomi global yang baru.

Namun kawasan Asia masih memiliki masalah dalam pengembangan infrastruktur untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aktivitas ekonomi. perkembangan infrastruktur di kawasan Asia hingga 2030 membutuhkan modal investasi melebihi US\$ 22,6 triliun, atau US\$ 1,5 triliun per tahun jika ingin mempertahankan momentum pertumbuhan di kawasan ini, namun kemampuan negara-negara di Asia serta sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur saat ini kurang mampu untuk mengikuti kebutuhan pertumbuhan di kawasan Asia.

Hal ini dimanfaatkan China dengan membentuk AIIB sebagai wadah untuk memudahkan eksplorasi kawasan Asia. *Modern world system* menggambarkan ekonomi internasional merupakan arena pertarungan hirarki antara kepentingan negara-negara pusat *core* dengan negara-negara pinggiran yang lemah dan terbelakang dalam bentuk eksploitatif. Sistem pembagian kerja internasional yang diciptakan *core* terhadap *periphery* melalui kemampuan ekonomi, jenis produksi, penguasaan teknologi dan strategi perdagangan menjadikan negara-negara *periphery* terhambat kemajuannya dan selalu bergantung terhadap negara-negara *core* baik secara ekonomi maupun politik, sehingga negara-negara *periphery* tidak bisa lepas dari sistem yang ada. Dengan demikian, fenomena pembangunan dan keterbelakangan suatu kawasan dalam perspektif sistem dunia adalah mekanisme eksploitasi negara *core* terhadap negara *periphery* dengan ditandai dengan adanya aliran surplus perdagangan ke negara-negara *core*.

Kebijakan pembiayaan infrastruktur dapat dikategorikan sebagai elemen finansial yang diartikan sebagai elemen yang berpotensi paling mudah diterima oleh negara mitra. Hal tersebut terlihat dari perannya paling memberikan ketergantungan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangkakan pendek. Meskipun resikonya tergantung pada isi perjanjian hutang yang diadakan oleh pihak di dalamnya. Bantuan finansial umumnya terjadi dengan komitmen kontrak kerjasama, Elemen finansial terdiri dari nilai bantuan finansial dan hutang, serta nilai investasi dengan komitmen kontrak kerjasama

### ***Dampak dari AIIB Merubah Dependensi dan Kelas Dalam Modern World System***

Salah satu bentuk representasi hegemoni yaitu adalah adanya keberpihakan negara-negara terhadap negara yang dominan dalam sistem internasional. Dalam konteks ini negara berpotensi berada pada posisi dominan jika negara lain bergabung ke dalam institusi kerjasama atau institusi yang diinisiasi langsung oleh negara dominan tersebut, maupun yang dibentuk oleh dua atau lebih negara. Intitusi kerjasama dalam hal ini berperan bagi negara hegemon untuk mempertegas pengaruhnya atas negara mitranya, atau sebagai alat penyebaran pengaruh hegemoni. Negara hegemon membentuk suatu institusi kerjasama dengan tujuan menjaga stabilitas hegemoninya di negara mitra baik dalam keadaan terancam maupun tidak oleh negara penantangannya.

Dalam konteks hegemoni insitusional, AS dan China membentuk berbagi institusi kerjasama multilateral. Institusi multilateral ini kemudian menjadi aspek utama untuk melihat dominasi hegemoni yang dominan. Institusi multilateral dalam konteks ini adalah kerjasama yang dibangun oleh AS dan China, yang persebarannya AS membentuk APEC dan TPP, sedangkan yang dibangun oleh China yaitu Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Program dan perjanjian finansial juga masih memperlihatkan posisi yang serupa dimana AS tetap dominan bila dibandingkan China. Posisi tersebut terlihat dari jumlah kerjasama, rata-rata, dan keunggulan intensitas, yang masih didominasi oleh AS bahkan melampaui China. AS di sisi lain mempunyai mitra yang lebih banyak dibandingkan jumlah mitra China. Meskipun AS mendominasi sektor ini akan tetapi perlu dilihat lebih lanjut bahwa China justru mengalami peningkatan pada perluasan jumlah mitranya di tengah menurunnya jumlah mitra AS. Hal ini juga berbarengan dengan siasat OBOR China, dimana kelembagaan AIIB sebagai penunjangnya mempunyai potensi untuk menarik perhatian negara mitra sehingga mampu menempatkan China berada di posisi lebih unggul.

Perubahan dinamika ekonomi di Asia menyebabkan terjadinya penyesuaian dalam kebijakan ekonomi luar negeri Australia terhadap Asia. Karena adanya perubahan lingkungan strategis di Asia saat ini. Australia perlu untuk merumuskan format kebijakan ekonomi sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Agar tetap menjadikan Australia sebagai mitra strategis melalui kerjasama multilateral ekonomi maupun sumber daya alam dan teknologi terhadap Asia dan sebagai mitra strategis melalui kerjasama multilateral keamanan terhadap AS dan Eropa. Kedekatan Australia dengan AS menjadikan Australia memiliki posisi yang amat penting di Asia Timur.

Dependensi Australia terhadap AS dan negara Eropa yang dulu melalui keamanan dan politik kini bertransformasi mengikuti perubahan zaman dengan lebih berorientasi kepada kerjasama ekonomi yang berkembang. Hal ini dilatar belakangi *Historical cultural* Australia sebagai *misplaced* continent terlihat dari pelaksanaan sistem pemerintahan Australia yang mengarah ke Eropa. Namun secara geografis letak Australia berada pada lingkaran masyarakat yang berbeda, seperti Pasifik Selatan. Dalam kenyataan seperti ini, posisi politik Australia berada di antara akar budaya Inggris dan hubungannya dengan Negara-negara Asia Pasifik karena kedekatan geografis.

Australia dalam memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB disebabkan oleh dilema yang dihadapi mereka. Amerika Serikat sebagai salah satu aliansi terpenting bagi Australia yang mendorong agar Australia tidak bergabung ke dalam AIIB. Namun, China yang merupakan mitra dagang utama bagi Australia. Dilema ini lah yang menyebabkan terjadinya perdebatan internal di dalam kabinet pemerintahan Australia di era Perdana Menteri Tony Abbot. Kubu pro Amerika Serikat yang oleh Menteri Luar Negeri Julia Bishop menyarankan agar Australia tetap menjaga resistensinya terhadap AIIB dan tetap menjaga hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Sedangkan kubu pro China yang dipimpin oleh Treasurer Joe Hockey menyarankan agar Australia tidak boleh melewatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan bergabung ke dalam AIIB. Bergabungnya Australia dalam keanggotaan AIIB menjadikan Australia perubahan kebijakan yang dulu lebih berorientasi kepada AS dan Eropa dalam hal keamanan dan politik menjadi lebih berorientasi pada kebijakan ekonomi dengan berorientasi ke timur ([investor.id](http://investor.id), 2020).

Kemandirian suatu negara yang dijelaskan dalam *modern world system* akan berdampak terhadap pola dependensi suatu negara terhadap negara lain. Hal ini memungkinkan adanya pergeseran pengaruh terhadap negara Asia dari barat. Negara-negara atau kota-kota utama dunia yang selama ini menjadi pusat-pusat bisnis, keuangan, teknologi, dan perdagangan internasional, yang mengendalikan seluruh rangkaian denyut perekonomian yang berlandaskan sistem kapitalis seperti:

Washington, New York (USA), London (Inggris), Paris (Perancis), Berlin (Jerman), Tokyo (Jepang), Brussel (Belgia), Amsterdam (Belanda) serta negara-negara Eropa Barat maju lainnya termasuk Australia. Jika melihat dari ini, Australia memiliki kecenderungan terhadap pola ketergantungan negara-negara *periphery* di kawasan Asia terhadap Australia yang menjadi salah satu negara maju yang mengendalikan seluruh rangkaian denyut perekonomian yang berlandaskan sistem kapitalis. Wilayah-wilayah ini menjadi penyangga sekaligus simbol tegaknya sistem kapitalis global, yang mendominasi sebagian besar aktivitas perdagangan dunia.

Suatu negara dapat menjadi semi pinggiran karena proses kemerosotan, di mana negara-negara ini semula merupakan negara pusat, tetapi kemudian mengalami proses penurunan kapasitas produksi serta penurunan peran kekuasaan negara. Kemunduran ekonomi ini yang terkadang ditandai proses deindustrialisasi seringkali menyeret suatu negara jatuh ke dalam siklus pusaran semi pinggiran (Wallerstein, 1984). Hal itu seperti yang dialami oleh Portugis dan juga Spanyol, serta Polandia di abad 15 dan 16. Ketiga-tiga negara tersebut pernah mengalami tingkat kemajuan industri maupun perdagangan. Bahkan dua negara yang pertama, yakni Portugis dan Spanyol, mampu melakukan ekspansi ke sejumlah wilayah dunia, tetapi kemudian mengalami stagnasi dan kemunduran ekonomi.

Sedangkan Australia sebagai negara yang secara geografi berada di kawasan yang tidak dilalui OBOR akan dapat mengalami proses penurunan kapasitas produksi serta penurunan peran kekuasaan. Penting untuk Australia dapat mengambil momentum *Asia century* agar dapat secara terus menerus mengamankan dominasi ekonomi dan politik di kawasannya. Australia melalui AIIB akan dapat mempengaruhi arah dalam setiap kebijakan AIIB yang nantinya akan sejalan dengan kepentingan nasionalnya Australia. Melalui jalur maritim, Australia akan mengamankan kepentingan ekonominya. Pandangan Wallerstein sistem dunia berkembang melalui kecenderungan sekulernya yang meliputi proses pencaplokan (*incorporation*), komersialisasi agraria, industrialisasi, dan proletarianisasi. Bersamaan dengan itu, sistem ekonomi dunia memiliki irama perputaran (*the cyclical rhythms*), yakni irama ekspansi dan stagnasi yang terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang dunia. Perputaran inilah yang secara berkali-kali terjadi, melalui krisis, sehingga menempatkan kedudukan suatu negara berada dalam posisi sentral, semi pinggiran, bahkan terlempar menjadi pinggiran

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kepentingan Australia bergabung dalam AIIB dapat dilihat dari 4 prospek yang berorientasi kepada:

1. Adanya pergeseran dependensi negara *periphery* ke negara *core* dari eropa sentris menjadi Asia sentris
2. Menjaga sistem kapitalistik yang berjalan antara *core* dan *periphery* di Asia
3. Stabilitas kelas dalam sistem dunia tetap terjaga.
4. Kepentingan ekonomi Australia dalam *Asian Century*.

Kebijakan pembiayaan infrastruktur ini menggambarkan peran pembiayaan dalam mempengaruhi sekaligus memberikan ketergantungan bagi negara *periphery*. Hal inilah selanjutnya menjadi dasar dominasi negara *core* melalui investasi asing yang masuk ke negara *periphery* baik berupa modal maupun *direct-invest*. Sehingga sebagian besar bantuan yang diterima oleh negara *periphery* merupakan sistem kapitalistik yang dibuat oleh negara *core*.

Pembiayaan infrastruktur AIIB memiliki kerkaitan terhadap rekondisi dalam menangani kesenjangan ekonomi antara *periphery* AIIB nantinya akan mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dengan melakukan bantuan investasi khusus di bidang infrastruktur yang menjadi faktor utama kebutuhan kawasan Asia dalam memenuhi perkembangan kegiatan ekonomi.

Rekonstruksi di kawasan Asia oleh akan berdpmpak terhadap modernisasi industri, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya taraf hidup orang di asia. Maka wilayah Asia secara otomatis akan memiliki jumlah populasi kelas menengah terbesar di dunia, yang diperkirakan akan mencapai jumlah 2,5 miliar orang di tahun 2030. Peningkatan-peningkatan ini baik produk barang dan jasa, dengan sendirinya akan menciptakan jumlah permintaan yang besar dalam pasar di kawasan Asia, sehingga bisa dikatakan tren perekonomian Asia berkembang berdasarkan pada paritas daya beli dan jumlah populasi kelas menengah sehingga menjadikan perlu adanya suatu kebijakan yang akan menjaga sistem dalam ketergantungan negara *core* dan *periphery* terus berjalan.

### Daftar Pustaka

- Asian Development Bank "Meeting Asia's Infrastructure Needs: February 2017"*, adb.org, diakses pada 10 November 2020 dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf>
- dpr.go.id "*Penguatan Pengaruh Tiongkok Di Kawasan Asia Pasifik Melalui Pembentukan Aiiib*" L Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015 oleh Humphrey Wangke Diakses pada 10 November 2020 dalam [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VII-7-I-P3DI-April-2015-4.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-7-I-P3DI-April-2015-4.pdf)
- Goldstein, Joshua S and Jon C. Pevehouse. "*International Relations Tenth Edition*". United States of America: Pearson Education Limited. 2014.
- Investor.id. "*Australia akan Bergabung ke AIIB*" Diakses pada 10 November 2020 dalam <https://investor.id/international/australia-akan-bergabung-ke-aiib>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia "*Penandatanganan MoU Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* ", kemenkeu.go.id. Diakses pada 13 juni 2017 dalam <https://kemenkeu.go.id/SP/penandatanganan-mou-asian-infrastructure-investment-bank-aiib>
- Kindleberger. Charles P. "*Economic Development, McGraw-Hill Book Company*", Inc., New York, 1983.
- Morgenthau, Hans. J. "*In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*". New York: University Press of America. 1951.
- Reuters.com. "*China-led AIIB approves 13 new members, Canada joins,*" *United Stated News Edition of* Diakses pada 18 Mei 2017 dalam <http://www.reuters.com/article/us-china-aiib-idUSKBN16U0CG>.
- Wallerstein , Immanuel. "*the Modern World-System*", Academic Press, New York. 1974.